

Analisis Variasi Jumlah Sekolah dan Hubungannya Dengan Anggaran Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah di Setiap Provinsi di Indonesia

Immanuel G B S
immanuelgbs@gmail.com

M.R. Djarot Sadharto W
sadharto@gmail.com

Abstract

Every each schools in Indonesia has lots of variations. The method of research is used including of using secondary data (quantitative) using: 1) classification and typology analysis of the Six Coridor of Indonesia; 2) analysis of coleration product moment3) Analysis of quantitative descriptive statistics and analysis of maps.The result of the research shows that there are a lot of variations in the number of schools for each level of the typology of the Six Coridor of Indonesia. Educational budget provided by the government in each province is different depends of number of teacher and schools in each province. The proper policy recommendations for the central government are focusing the education development in the province had a high ratio, allocating more education budget to provide more qualified education forces and proper education facilities, forming supervision agent and doing routine evaluation for education sector in every province.

Key words: education, edication facilities, education budget.

Abstrak

Jumlah sekolah di setiap provinsi di Indonesia memiliki variasi. Metode penelitian yang digunakan meliputi penggunaan data sekunder (kuantitatif) dengan menggunakan: 1) Klasifikasi dan analisis tipologi Enam Koridor Indonesia; 2) Analisis korelasi Product Moment; 3) Analisis statistic deskriptif kuantitatif dan analisis peta. Hasil penelitian menunjukkan terdapat variasi jumlah sekolah pada setiap tingkat pendidikan pada tipologi Enam Koridor Indonesia.Anggaran pendidikan yang disediakan pemerintah pusat pada setiap provinsi berbeda-beda tergantung jumlah guru dan jumlah sekolah di setiap provinsi.Rekomendasi kebijakan yang sesuai untuk pemerintah pusat adalah memfokuskan pembangunan di provinsi yang memiliki rasio yang tinggi, mengalokasikan anggaran pendidikan untuk menyediakan tenaga pengajar yang berkualitas dan fasilitas pendukung yang memadai, membentuk badan pengawas serta melakukan evaluasi rutin terhadap pembangunan pada sektor pendidikan setiap provinsi.

Kata kunci : Pendidikan, Fasilitas Pendidikan, Anggaran sektor pendidikan

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan komponen strategis dan mendasar dalam pembangunan suatu bangsa. Menjadi bangsa yang maju dan berkembang merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh setiap negara di dunia. Maju atau tidaknya suatu negara juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari sudut pandang pendidikan. Pendidikan yang berkualitas akan mencetak sumber daya manusia yang berkualitas baik dari segi spritual, intelegensi maupun keterampilan. Akan tetapi apabila output dari proses pendidikan yang dilakukan oleh suatu negara tersebut gagal atau tidak berjalan dengan baik maka akan sulit untuk mencapai kemajuan. Peningkatan mutu pendidikan juga berpengaruh terhadap perkembangan suatu bangsa. Sehingga bagi suatu bangsa yang ingin maju, pendidikan harus dipandang sebagai sebuah kebutuhan sama halnya dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Pendidikan mendapat perhatian yang khusus di Indonesia untuk memajukan kehidupan bangsa Indonesia. Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea yang ke 4 terdapat peraturan yang mengatur tentang tujuan negara terhadap pendidikan rakyat Indonesia yaitu yang menyatakan “negara bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa” (Undang-Undang Dasar 1945). Pada pernyataan tersebut tersirat tentang pengertian bahwa negara Indonesia memiliki salah satu tujuan di dalam pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dalam hal ini adalah melakukan pelaksanaan terhadap semua wilayah yang termasuk ke dalam negara Indonesia. Di dalam upaya mewujudkan tujuan negara yang tertulis di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut terdapat beberapa peraturan-peraturan lainnya yang terkait yaitu pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana tercantum bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan

pengajaran (Undang-Undang Dasar 1945). Selain itu juga terdapat pernyataan yang mendukung tentang hak rakyat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu yaitu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IV ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu (UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Terdapat beberapa perbedaan di dalam pembangunan terhadap sektor pendidikan di semua wilayah di Indonesia yang berdampak pada kualitas dari sumber daya manusia yang dihasilkan oleh wilayah tersebut. Beberapa perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan kualitas sumberdaya yang dihasilkan antara lain yaitu jumlah tenaga guru yang mengajar, kualitas guru, jumlah fasilitas pendidikan (SD, SMP, SMA, SMK). Pada fasilitas pendidikan yang disediakan oleh setiap daerah bergantung kepada anggaran pembiayaan pada sektor pendidikan daerah tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat variasi jumlah sekolah yang terdapat di setiap provinsi di Indonesia. Untuk melihat variasi jumlah sekolah dilakukan pengklasifikasian terhadap jumlah sekolah pada tahun 2010 dengan memperhitungkan jumlah penduduk usia sekolah. Melihat besarnya anggaran pendidikan yang disediakan pemerintah pusat dan hubungannya dengan jumlah sekolah serta membuat rekomendasi kebijakan yang sesuai yang dapat digunakan pemerintah untuk meratakan pembangunan yang dalam hal ini adalah jumlah sekolah.

Menurut Henk Huisman (1987) pelayanan sosial umumnya memiliki arti segala pelayanan yang diberikan pemerintah (diarahkan oleh pemerintah) dan dimaksudkan untuk memperbaiki tingkat kehidupan penduduk. Setiap pelayanan sosial yang akan dilakukan membutuhkan anggaran. Menurut

Mulyono (2010) Anggaran atau budget merupakan suatu instrument yang dirancang untuk memfasilitasi perencanaan. Lebih lanjut Mulyono mengatakan bahwa budget juga memberikan sebuah konteks proses perencanaan dalam pemilihan langkah-langkah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan yang dimana anggaran dianggap menjadi dokumen yang meringkaskan keputusan yang direncanakan dan dapat bertindak sebagai alat untuk memastikan penggunaan dana secara jujur dan hati-hati.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif Kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari data instansional, observasi dan studi pustaka atau litelatur yang sesuai dan berhubungan dengan penelitian. Data yang digunakan adalah time series dari tahun 2008 – 2010.

Survei instansional dilakukan untuk mendapatkan data-data nasional seperti data jumlah penduduk, jumlah penduduk usia sekolah, jumlah guru, jumlah sekolah serta jumlah anggaran pendidikan yang disediakan oleh pemerintah pusat pada tahun 2008 -2010.

Pengklasifikasian terhadap rasio penduduk usia sekolah per sekolah tiap jenjang pendidikan menggunakan klasifikasi yang berdasarkan standar deviasi, yang nantinya akan menghasilkan 3 kelas yaitu tinggi, sedang, rendah. Data yang digunakan adalah jumlah sekolah dan jumlah penduduk usia sekolah setiap provinsi di Indonesia.

Pengklasifikasian menggunakan standar deviasi dengan rumus :

$$s = \sqrt{\frac{\sum (xi - \bar{x})^2}{n}}$$

Keterangan:

s = standar deviasi

\sum = jumlah total semua rasio penduduk usia sekolah per sekolah di Indonesia

xi = jumlah rasiopenduduk usia sekolah per sekolah ke i sampai ke n

\bar{x} = nilai rata-rata jumlah rasiopenduduk usia sekolah per sekolah tiap tingkatan di Indonesia

n = jumlah provinsi (dalam penelitian ini = 33)

Berdasarkan rumus tersebut, dapat ditentukan klasifikasi jumlah sekolah berdasarkan rasiopenduduk usia sekolah per sekolah setiap tingkatan adalah sebagai berikut:

- Tinggi apabila $xi > (\bar{x} + s/2)$
- Sedang apabila $(\bar{x} - s/2) < xi < (\bar{x} + s/2)$
- Rendah apabila $xi < (\bar{x} - s/2)$

Untuk menemukan nilai rata-rata jumlah sekolah berdasarkan rasiopenduduk usia sekolah per sekolah tiap tingkatan di Indonesia digunakan rumus:

$$\bar{x} = \frac{\sum xi}{n}$$

Keterangan:

\bar{x} = nilai rata-rata (Mean)

\sum = jumlah total semua rasiopenduduk usia sekolah per sekolah di Indonesia

xi = jumlah rasio penduduk usia sekolah per sekolah dari i sampai ke n

n = jumlah provinsi (dalam penelitian ini = 33)

Selain berdasarkan klasifikasi menggunakan standar deviasi juga digunakan analisis tipologi. Analisis perbandingan jumlah sekolah setiap tingkatan pada setiap provinsi di Indonesia dilakukan dengan tipologi enam koridor Indonesia. Tipologi dibuat dengan menggunakan pedoman dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI)

yang dimana Indonesia dibagi kedalam 6 koridor. 6 koridor tersebut yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali – Nusa Tenggara dan Papua – Kepulauan Maluku.

Tipologi Klasifikasi	Tinggi	Sedang	Rendah
Sumatera			
Jawa			
Kalimantan			
Sulawesi			
Bali – Nusa Tenggara			
Papua – Kep. Maluku			

Didalam melihat hubungan antara jumlah sekolah dan jumlah anggaran dari pemerintah pusat dilakukan dengan menggunakan metode analisis korelasi product moment, kemudian di dalam menentukan kebijakan yang sesuai digunakan analisis peta dan statistik deskriptif kuantitatif dengan cara melihat data yang telah diolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Variasi Jumlah Sekolah di Setiap Provinsi di Indonesia

Pengklasifikasian dilakukan dengan menggunakan data rasio jumlah penduduk usia sekolah yang terdapat di setiap provinsi yang ada di Indonesia. perhitungan tersebut menghasilkan 3 kelas yaitu kelas I yang berarti tinggi, kelas II yang berarti sedang dan kelas III yang berarti rendah.

Sekolah dasar merupakan tingkat pendidikan pertama di dalam jenjang pendidikan. Pada klasifikasi untuk tingkat pendidikan Sekolah Dasar, diketahui bahwa suatu wilayah termasuk kedalam klasifikasi rendah apabila rasio penduduk usia sekolah

per sekolah pada provinsi tersebut kurang dari 145, sedang apabila rasio lebih dari 145 tetapi kurang dari 190 dan tinggi apabila rasio lebih dari 190. Menurut kriteria tersebut maka berdasarkan analisis terhadap data-data rasio penduduk usia sekolah per sekolah masing-masing provinsi di Indonesia, terdapat 10 provinsi (30,30 %) yang dikategorikan ke dalam klasifikasi tinggi, 14 provinsi (42,42 %) yang termasuk ke dalam klasifikasi sedang dan 9 provinsi (27,28 %) termasuk kedalam klasifikasi rendah. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa sebagian besar provinsi di Indonesia termasuk kedalam kategori sedang. kemudian pada pembagian klasifikasi untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama, diketahui bahwa suatu wilayah termasuk kedalam klasifikasi rendah apabila rasio penduduk usia sekolah per sekolah pada provinsi tersebut kurang dari 301, sedang apabila rasio lebih dari atau sama dengan 301 tetapi kurang dari atau sama dengan 424 dan tinggi apabila rasio lebih dari 424. Menurut kriteria tersebut maka berdasarkan analisis terhadap data-data rasio penduduk usia sekolah per sekolah masing-masing provinsi di Indonesia, terdapat 7 provinsi (21,21 %) yang dikategorikan ke dalam klasifikasi tinggi, 15 provinsi (45,46 %) yang termasuk ke dalam klasifikasi sedang dan 11 provinsi (33,33 %) termasuk kedalam klasifikasi rendah. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa sebagian besar provinsi di Indonesia rasio penduduk usia sekolah per sekolah termasuk kedalam kategori sedang untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama.

Klasifikasi untuk tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas dibagi ke dalam tiga kategori, suatu wilayah termasuk kedalam klasifikasi rendah apabila rasio penduduk usia sekolah per sekolah pada provinsi tersebut kurang dari 758, sedang

apabila rasio lebih dari atau sama dengan 758 tetapi kurang dari 1097 dan tinggi apabila rasio penduduk usia sekolah per sekolah lebih dari 1097. Menurut kriteria tersebut maka berdasarkan analisis terhadap data-data rasio penduduk usia sekolah per sekolah masing-masing provinsi di Indonesia, terdapat 7 provinsi (21,21 %) yang dikategorikan ke dalam klasifikasi tinggi, 16 provinsi (48,49 %) yang termasuk ke dalam klasifikasi sedang dan 10 provinsi (30,30 %) termasuk kedalam klasifikasi rendah. Dari data tersebut, dapat dikatakan bahwa sebagian besar provinsi di Indonesia rasio penduduk usia sekolah per sekolah termasuk kedalam kategori sedang. Sama halnya dengan klasifikasi terhadap tingkat pendidikan lainnya, Sekolah Menengah Kejuruan juga dibagi kedalam tiga kategori. suatu wilayah termasuk kedalam klasifikasi rendah apabila rasio penduduk usia sekolah per sekolah pada provinsi tersebut kurang dari 1194, sedang apabila rasionya lebih dari atau sama dengan 1194 tetapi kurang dari 1589 dan termasuk kedalam klasifikasi tinggi apabila rasio penduduk usia sekolah per sekolah lebih dari 1568. Menurut kriteria tersebut maka berdasarkan analisis terhadap data-data rasio penduduk usia sekolah per sekolah masing-masing provinsi di Indonesia, terdapat 8 provinsi (24,24 %) yang termasuk ke dalam klasifikasi tinggi, 15 provinsi (45,46 %) yang termasuk ke dalam klasifikasi sedang dan 10 provinsi (30,30 %) termasuk kedalam klasifikasi rendah. Dari data tersebut, hasil yang didapat adalah hampir setengah provinsi dari total 33 provinsi termasuk kedalam kategori sedang. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar provinsi di Indonesia rasio penduduk usia sekolah per sekolah termasuk kedalam kategori sedang.

Berdasarkan dengan matriks tipologi enam koridor Indonesia dapat dilihat bahwa jumlah sekolah pada setiap provinsi yang terdapat di suatu pulau ada yang termasuk tinggi, sedang dan rendah. Setiap provinsi memiliki jumlah sekolah yang berbeda karena berdasarkan jumlah penduduk usia sekolahnya.

2. Gambaran Besarnya Anggaran Pendidikan dari Pemerintah Pusat Terhadap Setiap Provinsi dan Hubungan Kenaikan jumlah Anggaran dengan Kenaikan Jumlah Sekolah

Data yang digunakan dalam perhitungan ini adalah data anggaran pendidikan yang disediakan pemerintah tahun 2008-2010 dengan jumlah sekolah di setiap provinsi tahun 2008-2010.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, Provinsi yang mendapatkan anggaran yang paling besar adalah DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur. Keempat provinsi tersebut mendapatkan anggaran pendidikan yang besar karena jumlah sekolah yang terdapat pada provinsi tersebut banyak dan jumlah penduduknya juga banyak sehingga dana yang diperlukan untuk merawat dan menyediakan fasilitas pendidikan pendukung pembelajaran yang layak juga banyak.

Analisis korelasi product moment merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara jumlah anggaran pendidikan yang diberikan pemerintah dengan jumlah sekolah yang terdapat di setiap provinsi yang ada di Indonesia. berdasarkan perhitungan yang dilakukan, terdapat hubungan antara jumlah anggaran yang disediakan pemerintah pusat dengan jumlah sekolah untuk tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah

kejuruan yang terdapat di setiap provinsi pada tahun 2008 ke tahun 2009. Akan tetapi untuk tahun 2009 ke tahun 2010, tidak terdapat hubungan antara kenaikan jumlah sekolah pada setiap provinsi di Indonesia dengan jumlah anggaran dari pemerintah pusat.

3. Rekomendasi Kebijakan yang Sesuai Untuk Pemerintah Pusat.

Pembangunan fasilitas pendidikan yang didalam hal ini adalah sekolah tidak terjadi secara merata di setiap provinsi di Indonesia karena hal tersebut berdasarkan jumlah penduduk usia sekolah yang terdapat di provinsi tersebut.

Berdasarkan dengan perhitungan rasio yang dilakukan pada tujuan pertama terdapat beberapa provinsi yang rasio penduduk usia sekolah per sekolah setiap tingkat pendidikan yang tergolong klasifikasi tinggi jika dibandingkan dengan provinsi yang lainnya. Provinsi-provinsi yang termasuk kedalam klasifikasi tinggi tersebut disebabkan karena jumlah penduduk usia sekolah banyak sedangkan jumlah sekolah sedikit. Maka kebijakan yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah pusat dan bekerja sama dengan pemerintah daerah adalah membangun beberapa sekolah di provinsi yang memiliki rasio yang termasuk ke dalam klasifikasi tinggi agar rasio tersebut berkurang.

Jumlah sekolah sudah tercukupi di semua provinsi di Indonesia. namun tenaga pengajar dan fasilitas pendukung yang memadai di dalam proses belajar masih kurang sehingga kualitas sumberdaya manusia yang dihasilkan kurang bagus. Oleh sebab itu sebaiknya pemerintah pusat lebih mengutamakan untuk menyediakan tenaga pengajar yang berkualitas serta menyediakan fasilitas pendukung yang memadai seperti alat-alat laboratorium

dan buku pelajaran. Maka kebijakan yang sebaiknya dilakukan pemerintah pusat adalah mengalokasikan anggaran pendidikan untuk menyediakan tenaga kerja yang berkualitas serta menyediakan fasilitas pendukung pembelajaran yang memadai. Rekomendasi lainnya adalah pemerintah membentuk suatu badan pengawas agar anggaran yang disediakan oleh pemerintah dapat digunakan tepat sasaran. Rekomendasi kebijakan terakhir adalah pemerintah melakukan evaluasi rutin terhadap pembangunan fasilitas pendidikan di setiap provinsi untuk menjadi acuan terhadap pembangunan yang akan dilakukan nantinya lebih baik daripada sebelumnya.

KESIMPULAN

Penentuan klasifikasi jumlah sekolah yang terdapat di setiap provinsi menggunakan standar deviasi dan tipologi Enam Koridor Indonesia Pada pembagian klasifikasi berdasarkan standar deviasi menghasilkan 3 kelas yaitu tinggi, sedang dan rendah.

Terdapat variasi di dalam jumlah sekolah yang terdapat di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Jumlah sekolah yang berbeda-beda disebabkan karena jumlah penduduk usia sekolah yang berbeda-beda di setiap provinsi. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat memiliki jumlah sekolah yang banyak jika dibandingkan dengan provinsi yang lainnya karena pada ketiga provinsi tersebut jumlah penduduk usia sekolah sangat banyak. Maka jumlah sekolah yang diperlukan juga banyak untuk mencukupi kebutuhan penduduk usia sekolah tersebut.

Anggaran pendidikan yang disediakan oleh pemerintah pusat memiliki hubungan yang signifikan dengan kenaikan jumlah sekolah yang terdapat di setiap provinsi di Indonesia pada tahun 2008 ke tahun 2009. Akan tetapi tidak terdapat hubungan antara jumlah anggaran dengan kenaikan jumlah sekolah pada

tahun 2009 ke tahun 2010. Hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2010 tidak terdapat kenaikan anggaran akan tetapi terjadi pengurangan anggaran pendidikan. Walaupun terjadi pengurangan anggaran pendidikan, jumlah sekolah di setiap provinsi di setiap tingkat tetap mengalami kenaikan pada tahun 2009 ke tahun 2010.

Kebijakan yang sesuai untuk pemerintah adalah memfokuskan pembangunan pendidikan di provinsi yang termasuk ke dalam kategori rasio jumlah penduduk per sekolah yang tinggi jika dibandingkan dengan provinsi yang lain. Kebijakan lainnya adalah mengalokasikan anggaran pendidikan untuk menyediakan tenaga kerja yang berkualitas serta menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai. Selain itu rekomendasi lainnya adalah pemerintah membentuk badan pengawas agar anggaran pendidikan yang disediakan pemerintah dapat digunakan tepat sasaran serta pemerintah juga melakukan evaluasi rutin terhadap pembangunan sekolah di setiap provinsi agar pembangunan yang dilakukan selanjutnya lebih baik daripada sebelumnya.

Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2001. UU No 20 Tahun 2001 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta

Anonim. 2003. UU No 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta

Huisman, Henk. 1987. *Perencanaan Pelayanan dan Pusat Pelayanan. Regional And Rural Development Planning, Series VII*. Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Mulyono. 2010. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Ar-Ruzz Media: Yogyakarta